

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya lebih dekat kepada pemakai akhir (www.bps.go.id). Berikut merupakan realisasi dan kontribusi industri terhadap penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id):

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Industri Pengolahan Periode 2015-2019



Sumber: Kemenkeu, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1, realisasi penerimaan pajak industri pengolahan dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada periode kuartal-IV tahun 2017 penerimaan pajak dari industri pengolahan terealisasi sebesar Rp 380,23 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 9,21% sehingga menjadi Rp 415,04 triliun pada periode kuartal-IV tahun 2018. Perkembangan industri pengolahan tersebut kemudian semakin meningkat dibuktikan dengan realisasi sebesar Rp 429,51 triliun pada periode kuartal-IV tahun 2019. Menurut Horngren *et al*, (2015), perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri yang membeli komponen bahan baku dan mengolahnya menjadi barang jadi. Industri manufaktur terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi terbagi menjadi subsektor makanan dan minuman, subsektor rokok, subsektor farmasi, subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta subsektor peralatan rumah tangga (www.idx.co.id).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan industri manufaktur sedang adalah industri pengolahan yang memiliki banyaknya tenaga kerja sebanyak 20 hingga 99 orang atau lebih, sedangkan industri manufaktur besar adalah industri pengolahan yang memiliki banyaknya tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih (www.bps.go.id). Berikut merupakan pertumbuhan produksi industri manufaktur sedang dan besar:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan
(y-o-y) periode 2017-2019

Tahun	(y-on-y)				Tahunan
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2017	4,46	3,89	5,46	5,13	4,74
2018	5,36	4,36	5,04	3,90	4,07
2019	4,45	3,62	4,35		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.1, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan III 2019 (y-o-y) sebesar 4,35% menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang hanya tumbuh 3,62%.

Tabel 1.2

**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-
2019 Menurut Jenis Industri KBLI**

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	9,90	5,13
11	Industri Minuman	1,30	15,19
12	Industri Pengolahan Tembakau	-13,00	-12,73
13	Industri Tekstil	5,11	1,08
14	Industri Pakalan Jadi	0,95	15,29
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,83	1,83
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	11,22	-3,72
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	4,92	1,75
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,69	19,59
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-5,99	-0,04
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	9,58	4,46
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,89	-16,63
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	14,15	-10,23
24	Industri Logam Dasar	8,13	4,09
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	7,76	-22,95
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	1,74	-5,39
27	Industri Peralatan Listrik	5,71	3,98
28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	-6,01	-12,75
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	10,40	-12,32
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	11,25	-1,54
31	Industri Furnitur	5,29	4,06
32	Industri Pengolahan Lainnya	1,57	12,52
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,88	0,07
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		5,13	4,35

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.2, jenis industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan produksi terbesar dibandingkan industri lainnya adalah industri percetakan dan reproduksi media rekaman yang naik 19,59%, industri pakaian jadi dengan kenaikan 15,29%, industri minuman naik 15,19%, industri pengolahan lainnya naik 12,52%, dan industri makanan yang naik 5,13% (www.bps.go.id). Menurut

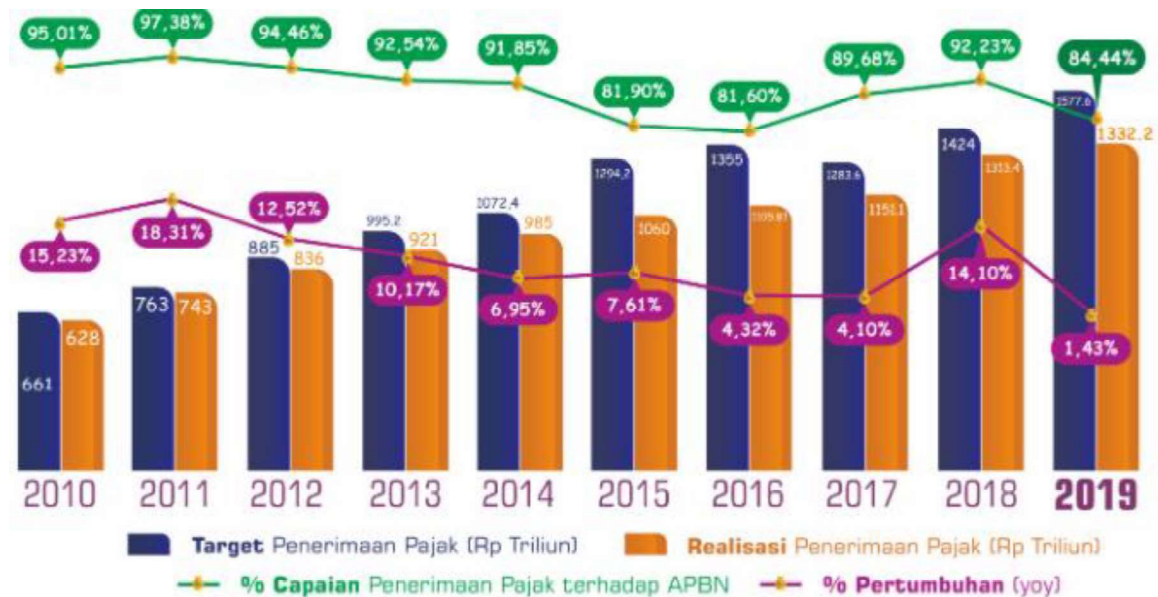
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. Ia mengatakan potensi industri makanan dan minuman di Indonesia bisa menjadi *champion*, karena *supply* dan *user*-nya banyak. Untuk itu, salah satu kunci daya saingnya di sektor ini adalah *food innovation and security* (www.kemenperin.go.id).

Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019, subsektor industri makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik merupakan 3 (tiga) subsektor terbesar dengan jumlah perusahaan yang terdaftar sebesar 46 perusahaan dari total keseluruhan 56 perusahaan (82,14%) pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019. Menurut Kementerian Perindustrian, industri farmasi merupakan salah satu sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada triwulan II tahun 2019, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (termasuk sektor kosmetik) mampu tumbuh hingga 8,12% atau melampaui pertumbuhan ekonomi di angka 5,07% (www.kemenperin.go.id). Dengan begitu, kementerian perindustrian berupaya untuk mendukung industri makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan penjualan yang akan berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan pajak negara.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Penerimaan negara dari pembayaran pajak merupakan pendapatan terbesar dibanding penerimaan lainnya oleh negara.

Gambar 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia



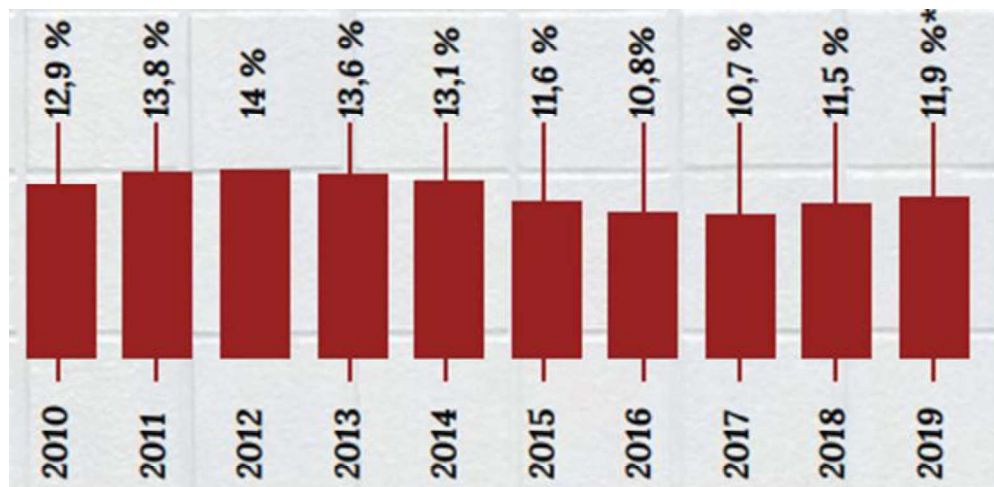
Sumber: www.cita.or.id

Berdasarkan Gambar 1.2, realisasi penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya pada periode 2017 hingga 2019 belum mencapai target penerimaan pajak

yang diharapkan pemerintah. Pada tahun 2017 hanya terkumpul Rp 1.151,1 triliun dari target sebesar Rp. 1.283,6 triliun atau hanya sebesar 89,6%. Pada tahun 2018 hanya terkumpul Rp 1.313,4 triliun dari target Rp 1.424 triliun atau hanya sebesar 92%. Pada tahun 2019 realisasi tercatat hanya sebesar Rp 1.332,2 triliun dari target Rp 1.577,6 triliun atau sebesar 84,4%.

Tax ratio adalah rasio/perbandingan antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut merupakan persentase *tax ratio* di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2019):

Gambar 1.3
Capaian *Tax Ratio* di Indonesia



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Gambar 1.3, capaian *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 10,7%, pada tahun 2018 mencapai 11,5% dan pada tahun 2019 mencapai 11,9%. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia belum mencapai *tax ratio* ideal

negara. Menurut Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, standar *tax ratio* ideal berada di kisaran 15%. Hal itu telah disepakati oleh seluruh anggota Bank Dunia.

Tax ratio dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: kebijakan perpajakan termasuk tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, dan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Rasio pajak juga menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukumnya (www.kemenkeu.go.id). Menurut Sri Mulyani, salah satu hal yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Hal ini adalah salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia (www.economy.okezone.com).

Menurut Pohan (2018), penghindaran pajak atau *tax avoidance* termasuk dalam penerapan *tax planning*. *Tax planning* merupakan usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien. Besarnya pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperolehnya, dengan semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam pengertiannya, *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi objek bukan pajak. *Tax avoidance* banyak dilakukan oleh wajib pajak karena *tax avoidance* adalah usaha atau strategi perencanaan pajak, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang

berlaku dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Misalnya, pada jenis perusahaan yang PPh Badannya tidak dikenakan secara final, perusahaan mengubah pemberian tunjangan karyawan berupa uang menjadi pemberian natura, mengingat natura bukan merupakan objek PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) sehingga dapat mengefisiensikan PPh Pasal 21, seperti pemberian tunjangan makan dalam bentuk uang tunai (*cash*) menjadi penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan.

Menurut Pohan (2018), *tax evasion* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, Wajib Pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara. Contoh *tax evasion* adalah dengan tidak melaporkan sebagian atau seluruh penjualan serta memperbesar biaya dengan cara fiktif (www.news.ddtc.co.id). Sedangkan *tax saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya dengan merekomendasikan Angka Pengenal Impor (API) untuk PPh Pasal 22 dalam rangka memperbesar penghematan pajak sebesar 5% mengingat transaksi impor atas barang

tertentu dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5% bagi perusahaan yang memiliki API, dan sebesar 7,5% bagi yang tidak memiliki API.

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT). Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Ia mengatakan, pemilik perusahaan memberikan pinjaman dimana ketika pinjaman tersebut bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Lantaran modal perusahaan dimasukkan sebagai utang yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan sehingga bisa terhindar dari kewajiban. Bambang menambahkan, apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014 tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar sementara omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar dan terdapat kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP khusus (www.kompas.com).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro menyatakan hal yang dilakukan oleh PT RNI tidak dapat menyalahkan perusahaan secara sepihak

mengingat aturan yang diberikan masih kurang kuat. Namun, ia mempertanyakan etika dari PT RNI yang telah menjadi perseroan terbatas namun tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi peraturan perpajakan (www.kompas.com). Berdasarkan kasus PT RNI, Direktorat Jenderal Pajak belum dapat membuktikan bahwa PT RNI melakukan penyelewengan terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa PT RNI melakukan penghindaran pajak masih dalam cara yang legal.

Pemerintah menerapkan peraturan-peraturan perpajakan agar penerimaan pajak negara dapat maksimal mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Di sisi lain, perusahaan memiliki tujuan memperoleh laba komersial yang maksimal dengan menghemat pembayaran beban pajak penghasilannya maka perusahaan membutuhkan perencanaan pajak. *Tax avoidance* merupakan strategi dan teknik perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Dalam perencanaan pajak dapat diterapkan konsep *taxability-deductibility* yang merupakan prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto). Prinsip *taxability-deductibility* merupakan prinsip dasar yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak

boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut (Pohan, 2018).

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), *tax avoidance* banyak dilakukan oleh wajib pajak karena *tax avoidance* adalah usaha atau strategi perencanaan pajak, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Menurut Setiawan dan Ahsan (2016), tarif pajak efektif adalah rasio yang menunjukkan efektivitas pembayaran beban pajak oleh subjek pajak atau badan diproporsikan dengan laba komersial yang diperoleh perusahaan. Menurut Surya dan Noerlaela (2016), *ETR* adalah tarif pajak efektif yang diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa *ETR* merupakan suatu tingkat pajak efektif perusahaan yang menunjukkan efektivitas pembayaran beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba komersial yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), terdapat 36 perusahaan sub sektor makanan minuman, farmasi, dan kosmetik yang terdaftar di BEI dan mengeluarkan laporan keuangan tahunan berturut-turut tahun 2017-2019. Persentase *ETR* perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3***Effective Tax Rate Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019***

NO	KODE	ETR Tahun 2017	ETR Tahun 2018	ETR Tahun 2019
1	ADES	25.16%	24.41%	23.86%
2	AISA	-0.46%	-44.34%	16.83%
3	ALTO	9.87%	27.70%	33.42%
4	BTEK	-4.23%	-2.21%	26.22%
5	BUDI	25,12%	29,69%	23,70%
6	CAMP	25,63%	26,29%	22,88%
7	CEKA	24,98%	24,91%	24,43%
8	CLEO	19,51%	22,24%	24,13%
9	DLTA	24,18%	23,37%	22,94%
10	HOKI	25,54%	25,34%	27,04%
11	ICBP	31,94%	27,73%	27,92%
12	IIKP	-24.02%	-10.68%	3.94%
13	INDF	32,88%	33,37%	32,53%
14	MLBI	25,72%	26,74%	25,85%
15	MYOR	25,42%	26,09%	24,59%
16	PCAR	157.49%	-12.27%	-3.73%
17	PSDN	39,95%	-114,13%	693,45%
18	ROTI	27,28%	31,97%	31,85%
19	SKBM	18,51%	23,61%	81,46%
20	SKLT	16.08%	19.24%	20.85%
21	STTP	25,13%	21,43%	20,50%
22	ULTJ	30,60%	26,07%	24,68%
23	DVLA	28,25%	26,45%	26,37%
24	INAF	18,53%	29,40%	18,30%
25	KAEF	26,24%	29,15%	58,52%
26	KLBF	24,31%	24,47%	25,42%
27	MERK	29.69%	25.55%	37.84%
28	PYFA	25.75%	25.36%	25.37%
29	SCPI	32,17%	34,18%	38,09%
30	SIDO	21,71%	23,50%	24,78%
31	TSPC	25,09%	25,74%	25,25%
32	KINO	22,18%	25,08%	18,94%

33	MBTO	22.01%	26.44%	24.15%
34	MRAT	5.33%	220.21%	94.57%
35	TCID	26,31%	26,24%	27,78%
36	UNVR	25,25%	25,24%	25,33%
		23,88%	27,22%	27,57%
		26,22%		

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa selama tahun 2017 hingga 2019 rata-rata *ETR* perusahaan industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik yang terdaftar di BEI adalah sebesar 26,22% yang artinya bahwa perusahaan rata-rata membayarkan beban pajak lebih tinggi dibandingkan tarif pajak *statutory* sebesar 25% dan 20%. Dari 36 perusahaan terdapat 33 perusahaan yang membayar pajak dengan tarif 25% dan 3 perusahaan membayar pajak dengan tarif 20%. Dari 33 perusahaan, terdapat 19 perusahaan yang memiliki *ETR* lebih tinggi dibandingkan *statutory tax rate* sebesar 25% dan sisanya sebanyak 14 perusahaan memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah dibandingkan *statutory tax rate*. Sedangkan dari 3 perusahaan yang memiliki *statutory tax rate* 20% memiliki nilai *ETR* yang lebih tinggi dibandingkan dengan *statutory tax ratenya*. Dengan data nilai *ETR* yang lebih tinggi dibandingkan *statutory tax rate* maka mengindikasikan bahwa perusahaan industri barang konsumsi sub sektor makanan minuman, farmasi, dan kosmetik yang terdaftar di BEI masih belum efisien dalam melakukan penghindaran pajaknya.

Effective Tax Rate (ETR) penting untuk perusahaan karena semakin rendah nilai *ETR* maka semakin efektif suatu perusahaan dalam melakukan manajemen pajaknya.

Perusahaan dikatakan berhasil melakukan manajemen pajak ketika nilai *ETR*-nya dibawah tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu 25% berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a). Sedangkan apabila perusahaan termasuk kategori yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yaitu bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana pada ayat (2a), maka tarif pajak perusahaan dengan kategori tersebut dikatakan efektif jika persentase *ETR* lebih rendah dari tarif pajak 20% (Rahmawati dan Mildawati, 2019).

Bagi pemerintah, *ETR* berfungsi untuk mengetahui faktor yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan peraturan perpajakan yang tepat dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Bagi investor, *ETR* dapat menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan investasi dikarenakan *ETR* yang rendah dapat menunjukkan efektivitas kinerja perusahaan dengan laba komersial yang lebih tinggi dibandingkan beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan sehingga potensi dividen yang akan diperoleh investor semakin tinggi.

Berdasarkan analisis data pada Tabel 1.3, PT Siantar Top Tbk (STTP) selama periode 2017 hingga 2019 memiliki nilai *ETR* yang rendah dibandingkan dengan

statutory tax rate diantaranya 25,13% pada periode 2017, kemudian menjadi 21,43% pada periode 2018, lalu menjadi 20,50% pada periode 2019. *ETR* yang semakin rendah setiap tahunnya menandakan bahwa perusahaan telah efisien dalam merencanakan pajaknya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 37,49% sejak awal tahun (triwulan I- 2019). Namun, di tengah kemerosotan IHSG, saham PT Siantar Top Tbk (STTP) justru masih bertahan. Sejak awal tahun 2019, saham STTP menguat 55,56%. Dalam sepekan, saham emiten barang konsumsi ini menguat 16,67%. Sementara dari sisi *top line*, pendapatan STTP naik 26,96% menjadi Rp2,59 triliun pada triwulan III tahun 2019. Pada Selasa 24 Maret 2019, saham STTP berada di level Rp 7.000 per saham. Ini adalah level STTP sejak perdagangan Jumat 20 Maret 2019. Sementara sejak perdagangan Senin 9 Maret 2019 hingga Kamis 19 Maret 2019, saham STTP hanya berada di level Rp 6.000 per saham. Hal ini menarik minat investor untuk melakukan investasi saham di PT Siantar Top Tbk (STTP) (www.investasi.kontan.co.id).

Menurut Waluyo (2017), tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dan dinyatakan dalam persentase. Menurut Astuti dan Aryani (2016), *ETR* bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Berdasarkan PSAK 46 (IAI, 2018), beban pajak (pajak penghasilan) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi suatu periode.

Terdapat beberapa faktor dalam perusahaan yang menjadi salah satu faktor penentu dalam menerapkan *tax avoidance* suatu perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* diantaranya yaitu likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan *leverage*.

Menurut Subramayam dan Wild (2010) dalam Tiaras dan Wijaya (2015), mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, “jangka pendek” dianggap periode hingga satu tahun. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang likuid.

Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bukti nyata terhadap pihak kreditur bahwa perusahaan dapat mengembangkan usahanya dan semakin likuid. Dalam penelitian ini, untuk mengukur likuiditas menggunakan *Current Ratio* yaitu membandingkan *Current Assets* dengan *Current Liabilities*. Menurut Kieso *et al*, (2018), *current ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan aset lancar perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. *Current assets* terdiri dari aset yang dapat dikonversi menjadi mata uang, seperti kas dan setara kas, persediaan barang dagang, piutang usaha, dan investasi jangka pendek dalam periode 1 tahun atau kurang, sedangkan *Current liabilities* atau utang lancar merupakan utang atau kewajiban yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam jangka waktu satu tahun (Kieso *et al*, 2018).

Dengan *current ratio* yang tinggi menandakan bahwa *current assets* perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi *current liabilities* yang dimiliki oleh perusahaan sehingga *current assets* dapat digunakan untuk memenuhi *working capital* perusahaan agar dapat beroperasi dengan lebih efisien karena diindikasikan dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Salah satu yang dapat dipenuhi dengan *working capital* adalah pembelian persediaan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), penilaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjual dapat menggunakan *Average Method* dan *First In First Out (FIFO) Method*. Secara komersial, perusahaan dapat menggunakan *FIFO method* untuk memperoleh harga pokok penjualan yang lebih kecil sehingga memperoleh laba komersial yang tinggi, dan dalam perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan metode *Average* untuk penilaian persediaan karena akan menyebabkan jumlah harga pokok penjualan menjadi lebih besar dibandingkan dengan metode *FIFO* saat terjadinya inflasi dengan kecenderungan harga semakin meningkat dimana terjadi kenaikan harga pada harga beli persediaan sehingga harga pokok penjualan yang besar dapat mengurangi laba fiskal perusahaan karena dapat dijadikan *deductible expense* sesuai UU PPh Pasal 6 ayat (1) yang akan mengakibatkan terjadi koreksi fiskal negatif sehingga beban pajak penghasilan perusahaan akan semakin rendah dibandingkan laba komersial perusahaan yang tinggi sehingga nilai *ETR* akan semakin rendah dan perusahaan diindikasikan melakukan *tax avoidance*.

Menurut Ramadani dan Hartiyah (2020), likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *ETR*. Menurut Sedangkan, menurut Rosalia dan Sapari (2017) serta Ariani dan Hasymi (2018), menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan atau *firm size* dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019). Menurut Kieso *et al.*, (2018) aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas.

Perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki nilai aset yang tinggi. Ketika nilai aset perusahaan tinggi maka beban yang ditimbulkan oleh aset tersebut juga tinggi, termasuk beban penyusutan. Dalam mengefisiensikan beban pajaknya, perusahaan dapat merencanakan strategi pajaknya pada beban penyusutan dengan cara menentukan umur manfaat *depreciable assets* secara komersial lebih lama dibandingkan umur manfaat *depreciable assets* secara fiskal. Dengan umur manfaat aset secara komersial yang lebih lama dibandingkan fiskal maka beban penyusutan perusahaan secara komersial setiap tahunnya akan lebih rendah dibandingkan secara fiskal sehingga laba komersial sebelum pajak menjadi tinggi. Dalam perencanaan pajak, perusahaan dapat diberlakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba fiskal menjadi lebih rendah disebabkan oleh beban penyusutan tersebut sehingga beban pajak

yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi rendah. Ketika beban pajak perusahaan yang dibayarkan rendah dibandingkan laba komersial perusahaan yang tinggi sehingga akan mengindikasikan nilai *ETR* menjadi rendah. Dimana semakin rendah nilai *ETR*, menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Triyanti, dkk (2020) serta Rahman, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut Reinaldo (2017) serta Susilowati, dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 12 menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 menyebutkan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen. Menurut Tiaras dan Wijaya (2015), proporsi komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.

Menurut POJK Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 19 menyatakan bahwa persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang berjalan dengan baik. Komisaris independen bertugas menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.

Semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin besar pula kontrol komisaris independen dalam bentuk pemberian arahan dan nasihat dalam mengawasi kebijakan direksi. Komisaris independen memberi arahan kepada direksi dengan berbagai cara, salah satu arahan yang dapat diberikan adalah terkait dengan piutang tak tertagih. Secara akuntansi, perusahaan dapat melakukan estimasi pencadangan atas piutang tak tertagih (*allowance method*) dengan cara memperkecil proporsi pencadangan atas piutang tak tertagih agar laba komersial sebelum pajak menjadi tinggi. Sedangkan secara pajak tidak mengenal adanya estimasi pencadangan sesuai UU PPh Pasal 9 ayat (1) sehingga akan menimbulkan koreksi fiskal positif. Namun, saat beban piutang secara nyata tidak dapat tertagih maka secara fiskal dapat mengakui penghapusan piutang tak tertagih menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai UU PPh Pasal 6 ayat (1) dengan memenuhi syarat menurut perpajakan yaitu telah dipublikasikan sehingga dapat dilakukan koreksi fiskal negatif dan laba fiskal menjadi rendah mengakibatkan beban pajak penghasilan perusahaan

akan semakin rendah dibandingkan laba komersial yang tinggi sehingga *ETR* akan semakin rendah mengindikasikan perusahaan melakukan upaya *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmawati, dkk (2016), komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Rosalia dan Sapari (2017), komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Susilowati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) dalam Tiaras dan Wijaya (2015), *leverage* menggambarkan jumlah dari pendanaan utang dalam struktur modal perusahaan. Menurut Setyoningrum dan Zulaikha (2019) *leverage* merupakan gambaran perbandingan utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. *Leverage* merupakan salah satu komponen penting dalam struktur modal perusahaan karena utang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)* untuk memproksikan *leverage*. Menurut Weygandt *et al*, (2019), *Debt to Asset Ratio* menunjukkan persentase total aset yang dibiayai oleh kreditor; dihitung sebagai total utang dibagi dengan total aset. Dimana jika perusahaan lebih condong melakukan pembiayaan melalui utang, maka perusahaan akan dibebankan dengan bunga yang harus dibayarkan terkait utang tersebut (Sadewo dan Hartiyah, 2017).

Dengan semakin tinggi *debt to asset ratio (DAR)* maka menunjukkan besarnya total aset yang dibiayai dari pinjaman kreditor, sehingga semakin besar proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Dengan semakin besarnya nilai utang/pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan maka kewajiban perusahaan untuk memenuhi pokok pinjaman serta beban bunga dari pinjaman akan semakin tinggi sehingga beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan akan semakin tinggi. Dalam kaitannya dengan pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) akan menimbulkan beban bunga pinjaman. Secara akuntansi, pembayaran bunga pinjaman pada utang sewa guna usaha akan mengurangi laba komersial sebelum pajak. Sedangkan menurut pajak, beban bunga pinjaman serta pokok pinjaman dapat dijadikan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sehingga akan menjadi koreksi negatif dalam laporan laba rugi fiskal. Hal ini menimbulkan bertambahnya beban operasional yang akan mengurangi laba fiskal sehingga akan membuat beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan semakin rendah. Beban pajak penghasilan yang rendah dibandingkan laba komersial yang tinggi sehingga mempengaruhi nilai *ETR* semakin rendah dan mengindikasikan upaya *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian Susilowati, dkk (2018) dan didukung oleh Ependi (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Reinaldo (2017), didukung dengan hasil penelitian Lionita dan

Kusbandiyah (2017) serta Setiawan dan Ahsan (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan *leverage* terhadap *tax avoidance* menjadi alasan peneliti ingin melakukan penelitian kembali atas keterkaitan variabel tersebut untuk mendapatkan bukti empiris terbaru. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setyoningrum dan Zulaikha (2019), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan dua (2) variabel, yaitu likuiditas dari penelitian Indradi (2018) yang menunjukkan hasil berpengaruh pada agresivitas pajak yang diproksikan dengan *ETR* dan komisaris independen dari penelitian Rosalia dan Sapari (2017) yang menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel *Corporate social responsibility (CSR)* dan struktur kepemilikan karena pada penelitian sebelumnya (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019) menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan pada agresivitas pajak yang diproksikan dengan *ETR*.
3. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri barang konsumsi sub sektor makanan minuman, kosmetik, dan farmasi yang merupakan 3 (tiga) sub sektor terbesar dalam industri barang

konsumsi. Sedangkan, penelitian sebelumnya menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2017-2019. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2014-2017.

Dengan adanya fakta bahwa perencanaan pajak yang agresif dapat menimbulkan efisiensi pajak bagi perusahaan, sehingga semakin banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan *ETR* sebagai indikator efisiensi perencanaan pajak yang telah dilakukan perusahaan tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sektor manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor makanan minuman, kosmetik, dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
2. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yakni likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan *leverage*. Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai

1. Pengaruh negatif likuiditas terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*
2. Pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*
3. Pengaruh negatif komisaris independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*
4. Pengaruh negatif *leverage* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama pembuat kebijakan agar lebih memahami faktor-faktor yang

digunakan oleh perusahaan guna melakukan penghindaran pajak sehingga kebijakan perpajakan yang dibuat dapat lebih memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan agar lebih mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kinerja guna mengefesiensikan beban pajak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya guna memberi wawasan peneliti dan sebagai sarana untuk menambah informasi dalam penelitian ilmiah.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya terkait likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar topik penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab telaah literatur membahas teori mengenai *tax avoidance* sebagai variabel dependen, teori variabel-variabel independen yaitu likuiditas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan *leverage* pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab analisis dan pembahasan berisi pengolahan data, hasil analisis data, dan pembahasan penelitian sebagai dasar menarik kesimpulan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.